

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesenjangan pembangunan merupakan fenomena yang dialami oleh banyak negara di dunia, baik pada tingkat global, regional, maupun nasional. Ketimpangan ini tercermin dari perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat serta ketidakmerataan akses terhadap layanan publik, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hasil pembangunan sering kali terdistribusi secara tidak seimbang antardaerah atau antarkelompok masyarakat, sehingga menimbulkan perbedaan capaian pembangunan yang signifikan (Amalia et al., 2022).

Sebagaimana penelitian (Karlina et al., 2022) menunjukkan adanya disparitas pembangunan yang nyata antarnegara ASEAN selama periode 2010–2022, di mana negara dengan kapasitas ekonomi dan infrastruktur yang lebih baik memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan negara lainnya. Temuan serupa juga ditunjukkan oleh (Wibawa & Arisanto, 2019), yang menjelaskan bahwa kebijakan pembangunan di Tiongkok pada masa kepemimpinan Jiang Zemin dan Hu Jintao mendorong pertumbuhan nasional, namun sekaligus memperlebar kesenjangan pembangunan antardaerah akibat fokus pembangunan yang tidak merata. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa arah dan implementasi kebijakan publik memiliki peran penting dalam menentukan tingkat pemerataan pembangunan.

Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menghadapi kebutuhan mendesak untuk menetapkan prioritas pembangunan. Secara umum, fokus utama pembangunan di negara-negara berkembang sering diarahkan pada sektor ekonomi. Sektor ekonomi menjadi titik perhatian utama karena kekurangan di bidang ini tidak hanya berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kemampuan negara untuk berkembang di bidang lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Kusumawardhana, 2023). Indonesia menjadi bagian dari negara yang menyepakati tujuan SDG's dalam forum internasional menjadikan 17 poin tersebut sebagai pedoman utama dalam melaksanakan pembangunan nasional. Salah satu fokus utama dalam agenda ini adalah upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial (Zen et al., 2025).

Pembangunan nasional di Indonesia terencana dan sistematis, yang pelaksanaannya diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan serta dokumen perencanaan resmi. Landasan hukum utama dari proses ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu, arah dan tujuan pembangunan nasional berakar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Meskipun pembangunan di Indonesia telah direncanakan dan diatur, hingga saat ini kegiatan pembangunan dan pusat-pusat perekonomian masih cenderung terkonsentrasi di

wilayah barat, terutama di Pulau Jawa (Syafri, 2022), dibuktikan melalui data realisasi investasi Triwulan II Tahun 2025, berikut ini:

Tabel 1.1 Data Realisasi Investasi

Realisasi Investasi Triwulan II Tahun 2025	
Pulau Jawa Rp 237,5 Triliun (49,7%).	Luar Pulau Jawa Rp 240,2 Triliun (50,3%).
Penanaman Modal Asing (PMA) Rp 202,2 Triliun (42,3%).	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp 275,5 Triliun (57,7%).

Sumber: <https://bkpm.go.id/id/info/realisasi-investasi>, Dokumen Capaian Realisasi Investasi Triwulan II Dan Semester I Tahun 2025, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, di akses pada 30 Juli 2025.

Berdasarkan Tabel 1.1, Meskipun secara nominal investasi di luar Pulau Jawa sedikit lebih tinggi (50,3%) dibandingkan dengan Pulau Jawa (49,7%), perlu diperhatikan bahwa wilayah luar Pulau Jawa terdiri atas banyak pulau besar dan kecil yang mencakup wilayah geografis yang sangat luas. Jika dilihat dari distribusinya, investasi tersebut belum menunjukkan pemerataan yang proporsional terhadap luas dan jumlah wilayah administratif yang ada di luar Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi investasi nasional masih terpusat dan belum sepenuhnya merata, yang pada akhirnya memperkuat indikasi adanya kesenjangan pembangunan antarwilayah di Indonesia. Berikut lima provinsi dengan realisasi investasi asing (PMA) dan dalam negeri (PMDN) tertinggi:



Gambar 1.1 Lima Provinsi Dengan Realisasi Investasi Tertinggi

Sumber: <https://bkpm.go.id/id/info/realisasi-investasi>, Dokumen Capaian Realisasi Investasi Triwulan II Dan Semester I Tahun 2025, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, di akses pada 30 Juli 2025.

Kondisi kesenjangan pembangunan tidak terlepas dari warisan kebijakan pembangunan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, di mana pembangunan difokuskan pada wilayah ibu kota melalui kebijakan yang dikenal sebagai “politik mercusuar”. Kebijakan ini ditandai dengan pembangunan proyek-proyek monumental di Jakarta, seperti Monumen Nasional (Monas), Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, dan berbagai infrastruktur strategis lainnya, yang bertujuan menjadikan Jakarta sebagai simbol kemajuan Indonesia di mata dunia. Meskipun memiliki nilai historis dan strategis dalam membentuk kebanggaan nasional, orientasi pembangunan yang terlalu terpusat di ibu kota telah menciptakan kesenjangan pembangunan antarwilayah yang struktural, wilayah-wilayah luar Jawa, bahkan daerah-daerah di pinggiran Pulau Jawa sendiri, mengalami

keterlambatan dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi (Yuniarto, 2023).

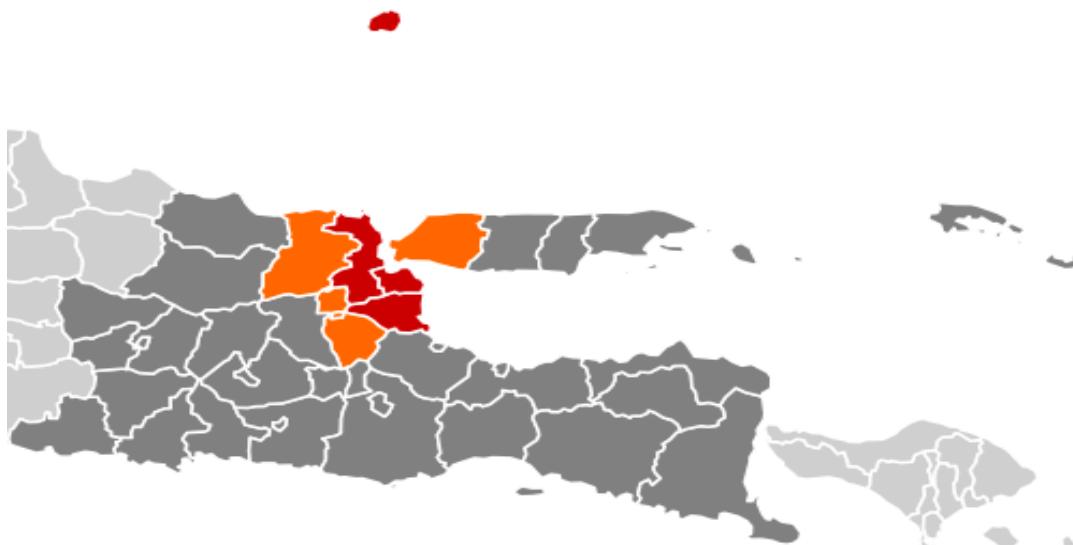
Tidak hanya dipengaruhi oleh warisan sejarah, arah dan capaian pembangunan di berbagai wilayah Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh sejauh mana potensi daerah mampu diidentifikasi, dikelola, dan diberdayakan secara optimal. Setiap daerah memiliki karakteristik geografis, sosial, ekonomi, dan budaya yang unik, yang apabila dimanfaatkan secara tepat, dapat menjadi kekuatan pendorong pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan (Suaib & Zulhijjah, 2024). Namun dalam praktiknya, pengembangan potensi daerah kerap menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses infrastruktur, lemahnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, hingga rendahnya investasi publik dan swasta di sektor-sektor produktif (Suparman, 2021).

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu wilayah strategis di Pulau Jawa dengan realisasi investasi urutan ketiga, masih menghadapi tantangan serius dalam hal kesenjangan pembangunan antarwilayah. Kesenjangan pembangunan di Jawa Timur tercermin dari disparitas antara kawasan utara dan selatan, serta antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Wilayah utara dan kawasan perkotaan seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik berkembang pesat berkat ketersediaan infrastruktur, konsentrasi industri, dan akses layanan publik (Komus, 2024). Sebaliknya, wilayah selatan dan kepulauan seperti Trenggalek, Pacitan, Bondowoso, dan Madura tertinggal dalam pertumbuhan ekonomi, kualitas SDM, serta penyediaan infrastruktur dasar. Ketimpangan ini terlihat dari indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat

kemiskinan, yang menunjukkan perbedaan signifikan antarwilayah (Anwar, 2024 & Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2025). Sehubungan dengan fenomena tersebut, dalam penelitian yang dilakukan (Abidin & Amiruddin, 2020), menjelaskan pola pembangunan yang selama ini cenderung terpusat pada kota-kota besar belum mampu menjangkau wilayah pinggiran secara optimal, perbedaan geografis, alokasi anggaran, infrastruktur, serta kualitas sumber daya manusia turut menyebabkan kesenjangan kesejahteraan dan akses terhadap pembangunan antarkabupaten.

Salah satu wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur adalah kawasan metropolitan Gerbangkertosusila sebuah akronim yang mewakili beberapa wilayah dari beberapa kabupaten dan kota antara lain, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan yang diakui sebagai kawasan metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek (Rahmadhani, 2023). Gerbangkertosusila masuk kedalam salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2022, Kawasan Strategi Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki dampak signifikan dalam skala nasional, yang berperan penting dalam berbagai aspek, termasuk kedaulatan negara, perekonomian, sosial, budaya, lingkungan, serta pertahanan dan keamanan nasional. Dengan status ini, pengembangan kawasan Gerbangkertosusila semakin diperkuat melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung optimalisasi pemanfaatan ruang, pembangunan infrastruktur strategis, serta peningkatan daya saing ekonomi dan investasi (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan

Investasi, 2022). Berikut gambar wilayah administratif Kawasan Gerbangkertosusila:



Gambar 1. 2 Peta Kawasan Gerbangkertosusila

Sumber: <https://images.app.goo.gl/ajqJj9Lv1gSKfYxB8>, Wikipedia, diakses pada 02 Juli 2025.

Kawasan Gerbangkertosusila memiliki luas keseluruhan 6.373,2 km² (Hamamah, 2023), dengan karakteristik wilayah yang heterogen, mulai dari kawasan pesisir, perkotaan padat, daerah industri, hingga wilayah pertanian. Perbedaan karakteristik ini membuat setiap kabupaten/kota di dalamnya memiliki peran yang saling melengkapi. Surabaya dan Sidoarjo, misalnya, menjadi pusat perdagangan, industri, dan jasa, Gresik berkembang sebagai kawasan industri berat, Bangkalan menguat sebagai wilayah penyeberangan dan konektivitas antar pulau, Mojokerto memiliki konsentrasi industri skala menengah, sementara Lamongan berkontribusi melalui sektor perikanan, pertanian, hingga kawasan industri baru yang sedang dikembangkan, berikut merupakan data luas masing-masing wilayah:

Tabel 1.2 Data Luas Kabupaten/Kota Kawasan Gerbangkertosusila

Kabupaten/Kota	Luas (km²)
Surabaya	350,54
Mojokerto	16,47
Bangkalan	1.001,44
Sidoarjo	634,38
Gresik	1.191,25
Mojokerto	717,83
Lamongan	1.782,05

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batu (2022),
diakses pada 28 Juli 2025.

Dari beberapa kabupaten dan kota yang tergabung dalam wilayah Gerbangkertosusila, Kabupaten Lamongan memiliki wilayah administratif terbesar dengan luas 1.782,05 km² dengan pembagian 3 wilayah, Utara, Tengah, dan Selatan. Lamongan Utara dikenal sebagai pusat aktivitas kelautan dan perikanan yang menjadi kekuatan utama perekonomian daerah. Lamongan Tengah berperan sebagai kawasan agraris dan tambak yang turut menjadi sentra perdagangan serta distribusi komoditas lokal. Sementara itu, Lamongan Selatan menunjukkan potensi sumberdaya perhutanan dan pertanian tada hujan (Febrianto, 2025).

Kabupaten Lamongan masih memiliki keterbatasan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki masing-masing wilayahnya, dengan beberapa perbedaan sumber daya yang dimiliki menyebabkan kesenjangan, terutama di wilayah Selatan. Sebagai langkah strategis untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan berkomitmen untuk memberikan perhatian khusus kepada Lamongan selatan melalui pengembangan kawasan industri yang direncanakan secara matang. Langkah ini sejalan dengan pernyataan Bupati Fadeli, yang menjabat selama dua periode (2011–2021), sebagaimana disampaikan dalam pemberitaan tahun 2013. Dalam pernyataannya, beliau menekankan pentingnya

perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan sebagai upaya strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut (Yakub, 2013), berikut pernyataannya:

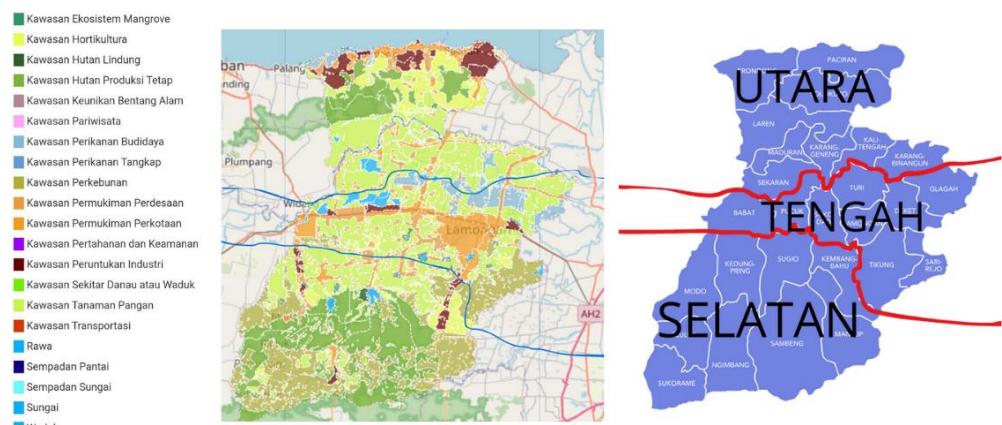
“Pemerintah Kabupaten Lamongan akan menjadikan wilayah selatan sebagai kawasan industri baru, sebab wilayah pantai utara sudah sejak lama menjadi sasaran investor dalam menanamkan modalnya, namun kini sudah penuh, sehingga wilayah selatan akan dijadikan alternatif sebagai kawasan industri baru. Saat ini sudah ada sejumlah investor yang melirik dan mendirikan pabrik di wilayah selatan, salah satunya sebuah produsen rokok yang padat karya”.

Sumber: <https://jatim.antaranews.com/berita/112788/pemkab-jadikan-selatan-lamongan-kawasan-industri-baru>, diakses pada 29 januari 2025.

Dengan berbagai potensi yang dimiliki, Kabupaten Lamongan bertekad untuk menjadi pusat industri dan logistik di kawasan timur Indonesia, serta mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru (Reggie, 2025). Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Pasal 7 Ayat 3 (f) Tahun 2025-2045 yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 menyatakan salah satu misi menuju Indonesia Emas 2045 yakni pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Untuk mendukung hal tersebut, telah disusun dan diterbitkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2012, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lamongan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2020-2039 yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021. Kebijakan ini diperkuat pula oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Tahun 2011–2031, yang menetapkan Kabupaten Lamongan sebagai salah satu kawasan peruntukan industri.

Berikut merupakan peta rencana tata tuang wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039, pembagian wilayah dalam peta tersebut didasarkan pada penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana diatur dan dijelaskan dalam Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021. Namun demikian, ketentuan yang dijelaskan secara rinci dalam peraturan tersebut hanya mencakup kecamatan-kecamatan di wilayah Lamongan Selatan. Adapun data mengenai wilayah Lamongan Utara dan Lamongan Tengah diperoleh penulis melalui wawancara dengan admin website SKALA Kabupaten Lamongan yang berasal dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan:



Gambar 1.3 Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Sumber: <https://skala.lamongankab.go.id/>, Website SKALA Kabupaten Lamongan, diakses pada 20 Mei 2025.

Berdasarkan Gambar 1.3 Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamongan Tahun 2020–2039, kawasan peruntukan industri di wilayah ini ditunjukkan dengan warna merah tua dan tersebar di tiga kawasan utama, yaitu

wilayah utara, tengah, dan selatan. Penelitian yang dilakukan oleh (Bahrudin & Trilaksana, 2024) menjelaskan bahwa perkembangan industri di Kabupaten Lamongan bermula dari wilayah utara. Wilayah ini berkembang lebih awal karena memiliki aksesibilitas yang tinggi. Letaknya yang strategis di pesisir pantai serta kedekatannya dengan pelabuhan menjadi faktor utama yang mendukung efisiensi jalur distribusi barang dan mobilitas logistik. Setelah itu, perkembangan industri meluas ke wilayah tengah Kabupaten Lamongan. Kawasan ini memiliki keunggulan berupa keberadaan jalan nasional utama yang menghubungkan antarwilayah kabupaten maupun kota, sehingga memperkuat koneksi dan mendukung kelancaran arus barang dan jasa hasil industri. Perluasan kawasan industri juga mulai mengintervensi wilayah selatan.

Meskipun demikian, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039, wilayah selatan secara dominan masih merupakan kawasan budidaya dan konservasi. Penggunaan lahan di kawasan ini lebih difokuskan pada sektor kehutanan, seperti hutan produksi tetap, perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, dan kawasan hutan lindung. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Lamongan, wilayah selatan diarahkan sebagai kawasan agropolitan dan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 diarahkan sebagai kawasan agroindustri. Artinya, pengembangan industri di wilayah ini harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan potensi lokal berbasis pertanian dan kehutanan.

Berikut ini merupakan data industri skala besar yang mulai beroperasi di wilayah selatan Kabupaten Lamongan pada rentang tahun 2022 hingga 2024:

Tabel 1. 3 Data Industri Tahun 2022-2024 Yang Mulai Beroperasi

Wilayah	Besar (Unit)	Menengah (Unit)	Kecil (Unit)	Mikro (Unit)
Utara	47	683	1491	12791
Tengah	120	672	8288	13654
Selatan	42	734	3750	9466

Sumber: [Kabupaten Lamongan Dalam Angka 2025 - Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan](#), Dokumen Kabupaten Lamongan Dalam Angka Tahun 2025, (Putra et al., 2025), diakses pada 27 Juli 2025.

Data industri yang disajikan dalam Tabel 1.3, menunjukkan adanya perbedaan banyaknya industri skala besar-mikro yang mulai beroperasi antarwilayah di Kabupaten Lamongan pada Tahun 2022-2024, khususnya dalam hal penyebaran industri skala besar. Dalam kurun waktu 2022 hingga 2024, tercatat bahwa wilayah selatan hanya memiliki 42 unit industri skala besar, masih tertinggal dibandingkan dengan wilayah tengah yang mencapai 120 unit, serta wilayah utara dengan 47 unit industri skala besar. Kondisi ini mencerminkan bahwa pertumbuhan sektor industri di wilayah selatan masih berjalan lambat dan belum seimbang dengan wilayah lain. Kesenjangan ini tidak hanya terlihat pada sektor industri besar, tetapi juga pada kategori industri kecil dan mikro, di mana wilayah tengah dan utara memiliki jumlah unit yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah selatan.

Adanya industri memiliki dampak positif terhadap suatu daerah, dalam penelitian (Wirastiti et al., 2024) dijelaskan bahwasanya, pembangunan industri memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah melalui penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan masyarakat, dan masuknya investasi. Selain itu, kebutuhan industri terhadap infrastruktur seperti

jalan, pelabuhan, dan fasilitas logistik turut mendorong pengembangan infrastruktur yang memberikan manfaat luas bagi wilayah sekitarnya. Aktivitas ekonomi yang dihasilkan juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi. Keberagaman sektor industri yang berkembang menjadikan perekonomian daerah lebih tangguh terhadap fluktuasi sektor tertentu. Secara keseluruhan, dampak positif ini berujung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Beberapa kondisi eksisting yang penulis dapatkan dari pra penelitian di wilayah Lamongan Selatan, antara lain:

Berdasarkan hasil kunjungan di beberapa kecamatan Lamongan Selatan yang dilakukan dalam tahap pra-penelitian, penulis mengidentifikasi sejumlah kondisi eksisting yang menggambarkan keterbatasan infrastruktur dasar di wilayah selatan Kabupaten Lamongan. Salah satu permasalahan utama yang menonjol adalah kondisi infrastruktur jalan beberapa ruas masih belum sesuai dari standar teknis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Jalan. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa banyak ruas jalan di wilayah Lamongan selatan berada dalam kondisi rusak, dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari kategori rusak sedang hingga rusak berat. Berikut ini merupakan salah satu dokumentasi visual kondisi jalan di wilayah Lamongan Selatan.



Gambar 1. 4 Kondisi Jalan di Wilayah Lamongan Selatan

Sumber: Dokumentasi penulis, pada tanggal 13 Maret 2025

Selain permasalahan kualitas jalan, isu minimnya fasilitas penerangan jalan umum (PJU) juga menjadi tantangan krusial yang berdampak langsung terhadap kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Secara topografis, wilayah selatan Lamongan didominasi oleh bentang alam perbukitan kapur dengan karakteristik jalan yang berkelok, sempit, dan memiliki elevasi yang bervariasi. Kondisi tersebut semestinya menjadi faktor pertimbangan utama dalam perencanaan dan penyediaan infrastruktur penerangan jalan. Namun demikian, hingga saat ini, fasilitas PJU di kawasan ini masih sangat terbatas dan belum mencakup seluruh jalur utama maupun jalan penghubung antarpermukiman. Pada malam hari, penerangan jalan lebih banyak mengandalkan cahaya dari rumah-rumah warga yang tersebar sporadis di sepanjang jalan. Jumlah rumah tersebut pun terbatas dan tidak mampu memberikan pencahayaan yang memadai, sehingga menciptakan area gelap yang berpotensi membahayakan pengguna jalan, terutama bagi pejalan kaki, pengendara roda dua, dan kendaraan angkutan barang. Hasil pra-penelitian ini didukung dengan

adanya tulisan artikel dalam *platform* berita yang ditulis oleh (Arifin, 2024) saat ada aksi protes yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan, berikut pernyataan dari salah satu demonstran:

“Banyak korban kecelakaan yang jatuh akibat kondisi jalan yang tidak layak. Namun sampai saat ini, pemerintah Kabupaten Lamongan tidak menunjukkan empati. Percuma saja perwakilan dari PUPR menemui kami jika tidak ada tindak lanjut. Jalan di Lamongan bagian selatan masih rusak parah, dan pemerintah kabupaten hanya melakukan pencitraan,” tegasnya. Iqbal menambahkan bahwa masyarakat tidak hanya menuntut perbaikan jalan, tetapi juga penerangan jalan yang masih minim di beberapa wilayah. “Lampu penerangan jalan di banyak wilayah belum dipasang. Kami hadir di sini sebagai bentuk kepedulian dari masyarakat Lamongan selatan. Kami tidak butuh pencitraan, kami butuh kinerja nyata”.

Sumber: <https://radarbangsa.co.id/kekeringan-air-dan-kerusakan-infrastruktur-picu-demo-warga-di-lamongan/>, (Arifin, 2024), diakses pada 27 Juli 2025.

Melihat berbagai persoalan yang masih terjadi di wilayah Lamongan Selatan, khususnya terkait keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan dan penerangan umum, lalu kurangnya minat investor berinvestasi di wilayah selatan, menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pembangunan antarwilayah di Kabupaten Lamongan dan berlangsung secara nyata.

Adanya potensi aglomerasi wilayah investasi di Kabupaten Lamongan, seharusnya menjadi momentum untuk mendorong pemerataan pembangunan yang adil dan merata berdasarkan potensi wilayah masing-masing. Kabupaten Lamongan memiliki daya tarik investasi, baik dari segi posisi geografis yang strategis maupun ketersediaan lahan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) seluas ±6.128 hektar yang tersebar di wilayah utara, tengah, dan selatan. Terdapat fasilitas infrastruktur dasar yang ditawarkan kepada para investor, sebagaimana pernyataan resmi pemerintah Kabupaten Lamongan dalam pemberitaan yang ditulis (Reggie, 2025) yang

menyebutkan bahwa kesiapan infrastruktur menjadi salah satu keunggulan utama dalam menarik investasi, berikut pernyataanya:

“Lamongan memiliki daya tarik investasi yang tinggi, baik dari segi aglomerasi wilayah yang strategis maupun potensi geografis. Saat ini, sisa lahan yang tersedia untuk Kawasan Peruntukan Industri (KPI) mencapai ±6.128 hektar, tersebar di wilayah utara, tengah, dan selatan,” katanya. Wilayah utara diarahkan untuk pengembangan perikanan tangkap, industri, dan permukiman. Sementara wilayah tengah fokus pada industri skala kecil-menengah dan permukiman. Sedangkan wilayah selatan diprioritaskan untuk sektor pertanian, industri pendukung pertanian, serta permukiman. Selain keunggulan geografis, kesiapan infrastruktur menjadi kunci utama yang ditawarkan Pemerintah Kabupaten Lamongan kepada para investor. “Infrastruktur yang memadai memberikan ketertarikan tersendiri bagi investor, dan akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ucap Pak Yes.

Sumber: <https://rri.co.id/daerah/1609051/aglomerasi-investasi-lamongan-strategis-ajak-investor-tanam-modal>, (Reggie, 2025), diakses pada 06 Agustus 2025.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam rangka pemerataan pembangunan di seluruh wilayah administratifnya, dengan fokus khusus pada kawasan Lamongan Selatan melalui strategi pengembangan industri yang mampu menarik minat investor sebagai pendukung pemerataan pembangunan. Penelitian ini mengadopsi kerangka teori yang dikembangkan oleh (Afifuddin, 2015), yang menyatakan bahwa upaya pemerintah daerah dalam memajukan pembangunan dapat dilakukan melalui lima kriteria utama, upaya tersebut meliputi: fasilitas, pemerintah daerah harus kreatif, politik lokal yang stabil, pemerintah daerah harus menjamin kesinambungan berusaha, dan pemerintah daerah harus komunikatif dengan LSM/NGO terutama dalam bidang perburuan dan lingkungan hidup. Melalui pendekatan teoritis tersebut, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam bentuk

rekомendasi kebijakan yang aplikatif bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah. Fokus penelitian ini kemudian dirumuskan dalam judul **“Upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan Mengatasi Kesenjangan Pembangunan Ekonomi di Lamongan Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu paparan latar belakang yang telah diuraikan, penulis akan meneliti terkait “Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mengurangi kesenjangan pembangunan ekonomi di Lamongan Selatan?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Melihat pada rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mendeskripsikan upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mengurangi kesenjangan Pembangunan ekonomi di Lamongan Selatan dengan lima uraian kriteria mulai dari fasilitas, pemerintah daerah harus kreatif, politik lokal yang stabil, pemerintah daerah harus menjamin kesinambungan berusaha, dan pemerintah daerah harus komunikatif dengan LSM/NGO terutama dalam bidang perburuan dan lingkungan hidup.

1.4 Manfaat Penelitian

Mengacu dari tujuan penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian

administrasi pembangunan dan kebijakan pembangunan daerah. Penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai peran pemerintah daerah dalam mengurangi kesenjangan pembangunan ekonomi antarwilayah dengan menggunakan perspektif teori administrasi pembangunan Afifuddin. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas isu kesenjangan pembangunan, pemerataan ekonomi, serta peran pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Selain manfaat ditinjau dari segi teoritis, penelitian ini juga diharapkan memiliki manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Bagi Universitas

Sebagai penunjang referensi penelitian yang akan datang oleh mahasiswa/i pada program studi Administrasi Publik, serta sebagai acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan;

2. Bagi Instansi

Menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam merumuskan dan merealisasikan perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan inklusif sebagai strategi untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah; sekaligus berfungsi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat agar lebih memahami peran strategis mereka sebagai elemen penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah.

3. Bagi Masyarakat Khususnya Lamongan Selatan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai upaya pemerintah daerah dalam mendorong pemerataan pembangunan ekonomi, sehingga masyarakat dapat memahami arah kebijakan pembangunan serta mendorong partisipasi aktif dalam proses pembangunan daerah.

4. Bagi Mahasiswa

Mendapatkan kemampuan praktis dari analisis permasalahan, penulisan, hingga permasalahan sesuai teori yang relevan.